

ISI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI

ANALISA HUBUNGAN ANTARA KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN
JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR



Diajukan Oleh:

HENDRI KURNIAWAN
NIM. 01043130046

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

16 07

c. 1/1

547.016 07

Kur

a
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



SKRIPSI

ANALISA HUBUNGAN ANTARA KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA
KENA PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN
JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR

16317

16675



Diajukan Oleh:

HENDRI KURNIAWAN
NIM. 01043130046

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : HENDRI KURNIAWAN
N I M : 01043130046
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISA HUBUNGAN ANTARA
KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DENGAN JUMLAH PENERIMAAN SANKSI
DENDA ADMINISTRASI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PALEMBANG ILIR TIMUR.


PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING


Tanggal 20 / 02 / 2008

Ketua

: 
: H. Aspahani, SE., Ak., MM
NIP. 132000093

Tanggal 21 / 02 / 2008

Anggota

: 
: Dewi Rina K., S.E., Ak
NIP. 132093577

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

N A M A : HENDRI KURNIAWAN
N I M : 01043130046
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISA HUBUNGAN ANTARA
KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DENGAN JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA
ADMINISTRASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PALEMBANG ILIR TIMUR.

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 14 Februari 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 18 Februari 2008

Ketua,



H. Aspahani, SE., Ak., MM.
NIP. 132000093

Anggota,



Dewi Rina K, SE, Ak.
NIP. 132093577

Anggota,



Rela Sari, SE., MSi., Ak.
NIP. 132231459

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Rina Tjandrakmana DP, SE, MM, Ak.
NIP. 132000097

MOTTO:

- **Kebahagiaan terindah di dunia adalah saat kita memberi dengan ikhlas, kebahagiaan termanis di akhirat adalah saat kita menuai keikhlasan di dunia.**
- **Manusia yang paling lemah ialah orang yang tak mampu mencari teman, tapi yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan teman tapi disia-siakan. (Ali bin Abu thalib)**
- ***Life is riding bicycle, to keep your balance, you must keep moving.***

Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua Orangtua & Kakak-Kakakku Tercinta**
- **Semua Keluarga**
- **Teman-Teman**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan kuasanya jugalah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **“Analisa Hubungan antara Ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Menyampaikan SPT Masa PPN dengan Jumlah Penerimaan Sanksi Denda Administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.”** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan Teori, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Analisis dan Pembahasan, dan BAB V Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan terdiri dari dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara dengan petuga pajak di KPP Palembang Ilir Timur mengenai hambatan dan upaya KPP dalam meningkatkan tingkat kepatuhan PKP terutama dalam menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu. Sedangkan data sekunder diperoleh adalah data mengenai jumlah SPT Masa PPN yang terlambat lapor serta jumlah penerimaan sanksi denda administrasi atas keterlambatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat ketidakpatuhan PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah penerimaan sanksi denda administrasi di KPP Palembang Ilir Timur, dimana hasil analisis yang menggunakan SPSS V.14 menunjukkan nilai $r = 0.607$ dan bersifat positif. Fungsi regresi yang didapat juga menunjukkan bahwa setiap ada tambahan satu SPT Masa PPN yang terlambat lapor maka jumlah penerimaan sanksi denda administrasi juga akan meningkat sebesar Rp.12.442,333.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja KPP dalam mengoptimalkan lagi penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN dan sebagai bahan masukan akademis bagi penelitian selanjutnya

Penulis,
Hendri Kurniawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho yang dikaruniakan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Hubungan antara Ketidapatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Menyampaikan SPT Masa PPN dengan Jumlah Penerimaan Sanksi Denda Administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur ” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Dra. Hj. Badia Perisade MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal A. K., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. H. Asahani, SE.,MM., Ak, Ketua pembimbing skripsi.
5. Dewi Rina Komarawati SE, Ak, Anggota pembimbing skripsi
6. Reli Sari, SE, M.Si, Ak, sebagai dosen tamu dalam ujian komprehensif.
7. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan petugas pajak di KPP Palembang Ilir Timur
9. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
10. Staf Pengawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat dekatku Genta, Fahmi, Hendra, Agung yang selalu menemani dan mendukung setiap langkahku dan yakinlah kalian bisa mendapatkan lebih dari yang kalian pikirkan.
12. Dicky dan Rifky Stifler, lestarikanlah budaya dan kebiasaan kita selamanya.
13. Andat, Enrico, Jhonsyah, Adi, Wesley, Leo, Helmi, dan semua perjaka penghuni Angkatan Emas 2004, kalian yang terbaik.

14. Dede, Fajri, Mahbub, Fikri, Rio, Assalamualaikum.
15. Para penggemarku Debi C, Septri, Yny, Lia, Suzan, Happy, Dwi M, Tata, Riri, Facho, Wita, Yuan, terima kasih atas surat-suratnya dan maaf kalau belum sempat dibalas.
16. Guru-guruku Anita, Anes, Indah, Desi S, Deri, terima kasih telah meniup lilin disaat aku terdesak.
17. Sahabatku di luar, Boney dan Iqbal, janganlah selalu mencoba meniru gayaku dan jadilah diri sendiri.
18. Semua wanita yang pernah mengisih hidupku, sadarilah kekurangan kalian.
19. Yang Terindah, Nurul Vita Utami.
20. Yang Sempurna, Resa Puji Astuti.
21. Yang Beruntung, Pendampingku.....

Semoga Allah SWT memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Penulis,

Hendri Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.4 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan.....	9
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	25
2.4 Objek dan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai.....	26
2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	35
2.6 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.....	37
2.7 Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT).....	40
2.8 Sanksi Administrasi.....	44
2.9 Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	48
3.2 Populasi.....	48
3.3 Definisi Variabel Penelitian.....	48
3.4 Deskripsi Data Penelitian.....	49
3.5 Teknik Analisa Data.....	53
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Analisa.....	58



4.2 Hambatan-hambatan penyebab PKP terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak membayar denda administrasi.....	64
4.3 Upaya KPP agar kepatuhan PKP meningkat dalam menyampaikan SPT Masa PPN dan denda administrasi.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah SPT Masa PPN yang masuk terlambat lapor dan jumlah penerimaan sanksi denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP pada tahun 2004	49
Tabel 3.2 Jumlah SPT Masa PPN yang masuk terlambat lapor dan jumlah penerimaan sanksi denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP pada tahun 2005.....	50
Tabel 3.3 Jumlah SPT Masa PPN yang masuk terlambat lapor dan jumlah penerimaan sanksi denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP pada tahun 2006.....	50
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.2 Koefisien Korelasi.....	59
Tabel 4.3 Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.4 Koefisien Regresi.....	61
Tabel 4.5 ANOVA.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Output SPSS

Lampiran 2 Tabel t

**THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INCOMPLIANCE OF
PKP IN SUBMITTING SPT MASA PPN WITH THE AMOUNT OF
RECEIPT OF ADMINISTRATION FINED IN TAX SERVICE OFFICE IN
PALEMBANG ILIR TIMUR**

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to understand the relationship between incompliance of PKP in submitting SPT Masa PPN with the amount of payment of administration fined in tax service office in Palembang Ilir Timur, (2) to know what kinds of obstacle are causing incompliance of PKP in submitting SPT Masa PPN and they don't pay the administration fined, and (3) to know what kinds of struggle are going to be done by tax service office in Palembang Ilir Timur to increase the compliance of PKP.

Research finding has proven that during period of years 2004-2006 that there is a tight relation between incompliance of PKP in submitting SPT Masa PPN with the amount of payment of administration fined in tax service office in Palembang Ilir Timur. It can be shown from the result of calculation of SPSS v.14 that correlation (r) scored is 0.607. The condition above may be caused by the lack of tax investigation. There are some struggles that tax office is going to do to increase the numbers of compliance of PKP such as: increasing administration fined and doing tax investigation more intensively.

According to the research therefore the writer suggest that tax officer must be more active in pressing a claim and doing investigation to suspect. On the other hand, tax service office should do some administrated reformation to simplify the procedures in paying tax and do some tax extension.

keywords: Incompliance of PKP, SPT Masa PPN, Administration fined

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
BAB I

N A M A : HENDRI KURNIAWAN
N I M : 01043130046
JURUSAN : AKUNTANSI
PROGRAM : REGULER
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISA HUBUNGAN ANTARA
KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DENGAN JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA
ADMINISTRASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PALEMBANG ILIR TIMUR.

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 26 / 11 / 07

Ketua

: H. Aspakani, S.E., Ak., MM
NIP. 132000093

Tanggal 22 / 11 / 07

Anggota

: Dewi Rina K, S.E., Ak
NIP. 132093577

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan terutama pembangunan dibidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia baik secara fisik maupun spiritual. Untuk dapat melaksanakan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan.

Beberapa tahun yang lalu, sektor migas merupakan sumber dana yang terbesar dari total penerimaan dalam negeri. Akan tetapi sumber dana dari migas ini tidak dapat secara terus menerus diandalkan, hal ini terbukti dengan turunnya penerimaan dari migas. Disamping itu juga harga migas di pasaran internasional sering tidak stabil, karena itu dipandang perlu oleh pemerintah untuk mengupayakan penerimaan lain di luar sektor migas yaitu melalui ekspor komoditi non migas dan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dana dari sektor pajak disamping digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilisator yaitu mengatur kestabilan ekonomi untuk mengatasi tidak terjadi gejolak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah dan sebagai regulator yaitu mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan disegala bidang.

Sejak tahun 1950 Indonesia memungut pajak atas lalu lintas barang di dalam masyarakat, yaitu pajak peredaran barang 1950 dan pada tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan. Ternyata pajak penjualan merupakan salah satu pajak tidak langsung yang memberikan pemasukan yang besar terhadap kas negara, akan tetapi bentuk pajak itu sudah ketinggalan dalam masyarakat dengan kondisi perekonomian saat ini untuk memenuhi kebutuhan akan suatu sistem pajak yang lebih modern.

Pajak penjualan 1951 diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984 yang kemudian diganti lagi menjadi PPN tahun 2000. Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini akhirnya tidaklah menjadi berat. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Secara umum, Subyek Pajak Pertambahan Nilai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pengusaha kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dipungut bila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh subyek pajak

Pertambahan Nilai tersebut. Pengusaha kena pajak sendiri terkadang juga tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pemeriksaan pajak hanya dilakukan terhadap pengusaha kena pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan masyarakat yang tidak mendaftarkan menjadi pengusaha kena pajak, tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan SPT, tidak dilakukan pemeriksaan pajak (Gunadi 2002:10).

Hal ini mendorong pengusaha kena pajak yang semula membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tidak lagi mematuhi kewajiban perpajakan yang sudah dilakukannya, karena kepatuhan yang sudah mereka lakukan mendapatkan pelayanan yang tidak ada bedanya dengan yang tidak patuh. Sehingga ada kemungkinan pengusaha kena pajak tidak diperiksa oleh aparat pajak karena pengusaha kena pajak tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan..

Kepatuhan pengusaha kena pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan PPN, dimana kepatuhan pengusaha kena pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materiil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang pengusaha kena pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh. Begitu juga untuk pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN, banyak sekali pengusaha kena pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Bahkan ada juga pengusaha kena pajak yang telah membayar kewajiban PPN-nya

namun mereka tidak melaporkan SPT Masa PPN-nya ke KPP setempat maka pengusaha kena pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP.

Sanksi administrasi yang telah ditetapkan tersebut tampaknya tidak dapat membuat para pengusaha kena pajak untuk menjadi lebih patuh terutama dalam menyampaikan SPT Masa tepat waktu. Hal ini diperburuk dengan prosedur yang ada di KPP yang biasanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak 3 bulan sekali, contohnya pada KPP Palembang Ilir Timur. Padahal setelah fiskus mengetahui bahwa pengusaha kena pajak terlambat lapor, maka pihak fiskus dapat langsung menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Meskipun STP telah diterbitkan, ternyata masih banyak juga pengusaha kena pajak yang tidak memperdulikan STP tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak pengusaha kena pajak yang tidak membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa tersebut.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana **“Analisa Hubungan antara Ketidapatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Menyampaikan SPT Masa PPN dengan Jumlah Penerimaan Sanksi Denda Administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang timbul adalah

1. Apakah ada hubungan antara ketidapatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN terhadap jumlah penerimaan sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di Kantor Pelayanan Pajak

Palembang Ilir Timur?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan pengusaha kena pajak tidak patuh dalam hal terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak membayar sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Palembang Ilir Timur agar kepatuhan pengusaha kena pajak bisa meningkat?

1.3 Tujuan, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup Pembahasan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN terhadap jumlah penerimaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan pengusaha kena pajak tidak patuh dalam hal terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak membayar sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur agar kepatuhan pengusaha kena pajak bisa meningkat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja, terutama pihak-pihak yang memerlukan.

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang selama ini telah diperoleh guna meningkatkan keterampilan dan kreatifitas di bidang perpajakan dan untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang pentingnya peran pajak dalam pembangunan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat kepustakaan dan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai teori dan praktek yang nyata tentang hubungan ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dengan jumlah penerimaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di KPP Palembang Ilir Timur.

3. Bagi Instansi

Sebagai informasi tambahan bagi instansi yang ingin mengetahui tentang bagaimana hubungan ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dengan jumlah penerimaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di KPP Palembang Ilir Timur.

1.3.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Penelitian hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.
2. Objek dari penelitian ini adalah hanya pada jumlah SPT Masa PPN yang masuk tidak tepat waktu dan jumlah penerimaan PPh Pasal sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP.
3. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 3 tahun yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

1.4 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan ke dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga dapat menggambarkan hubungan satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu pengertian pajak, fungsi pajak, subjek pajak, pengertian PPN, mekanisme pemungutan PPN, pengertian pengusaha kena pajak (PKP), pengukuhan PKP, dasar pengenaan pajak (DPP), pengertian SPT, fungsi SPT, sanksi administrasi, kepatuhan wajib pajak.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi variabel yang digunakan, skala pengukuran, jenis dan sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan program komputer SPSS versi 14. Dari hasil analisis komputerisasi tersebut akan diperoleh output-output seperti koefisien korelasi (r/R) dan koefisien regresi. Output-output itu nantinya akan diinterpretasikan sesuai dengan relevansi penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan penulis terutama setelah melakukan analisis terhadap data pada bab sebelumnya serta saran-saran berdasarkan kesimpulan yang mungkin nantinya akan berguna bagi pihak yang berkepentingan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
BAB II**

N A M A : HENDRI KURNIAWAN
N I M : 01043130046
JURUSAN : AKUNTANSI
PROGRAM : REGULER
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISA HUBUNGAN ANTARA
KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN
DENGAN JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA
ADMINISTRASI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PALEMBANG ILIR TIMUR.


PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal ¹⁰...../..¹²../⁰⁷.....

Ketua


: H. Aspakani, SE., Ak., MM
NIP. 132000093

Tanggal ³...../..¹²../⁰⁷.....

Anggota


: Dewi Rina K, S.E., Ak
NIP. 132093577

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito, 2004, *Wajib Pajak (Belum) Patuh*, Diambil pada tanggal 20 November 2007, dari www.kompas.com
- Deddy, 2007, *Perubahan KUP: Denda Tidak/Terlambat Laporan*, Diambil pada tanggal 20 November 2007 dari www.google.com Kategori: Denda Administrasi Pasal 7.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2000, *Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi.
- Resmi, Siti, 2005, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
- Tano, Julianto, 2004, *Analisa Hubungan antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak di KPP Palu*, Skripsi, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Tjahjono, Achmad., & Husein, Muhammad Fakhri, 2000, *Perpajakan*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan.
- Universitas Sriwijaya, 2007, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi*, Palembang.
- Waluyo, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2007, *Target Penerimaan Pajak di Tengah Berbagai Tantangan Ekonomi*, Diambil pada tanggal 20 November 2007 dari <http://www.pajak.go.id/>.
- _____, 2004, *Restitusi PPN di Indonesia*, Diambil pada tanggal 20 November 2007 dari <http://www.fiskal.depkeu.go.id/>.